

Judul : Kemenag Terus Rasionalisasi Biaya Haji
Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 6

Kemenag Terus Rasionalisasi Biaya Haji

JAKARTA—Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya merasionalisasi biaya haji pada 2023 agar tidak terlalu membebankan calon jamaah sekaligus menciptakan rasa keadilan yang berkelanjutan. Kemenag menyatakan, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2023 sebesar Rp69.193.733,60 masih bersifat usulan.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebagai mana yang disampaikan pemerintah kepada Komisi VIII DPR, Kamis (19/1), mengusung prinsip berkeadilan dan keberlanjutan bagi semua jamaah haji Indonesia. Pihaknya terus membuka ruang diskusi untuk merumuskan angka terbaik besaran ongkos haji tahun ini.

Sebelumnya Kemenag mengusulkan rata-rata Bipih 2023 sebesar Rp69.193.733,60. Angka tersebut merupakan 70% dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sisanya Rp29.700.175 (30%) diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Tingginya BPIH ini karena menyesuaikan

kan masih besarnya biaya layanan haji di *masyair* (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi sejak 2022.

Dia mengakui biaya dan nilai manfaat yang sangat tinggi diperlukan rasionalisasi. "Kita harus bisa menawarkan pembiayaan yang normal. Kita masih mencari solusi dan rasionalisasi bersama," ujar Hilman Latief dalam Media Gathering bertajuk Biaya Haji 2023 Naik? di Jakarta kemarin. Turut hadir dalam kegiatan yang dipandu oleh Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Hilman menyatakan, Kemenag berkomitmen menetapkan biaya haji yang memiliki prinsip keadilan dan berkelanjutan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Pihaknya berharap rapat pembahasan dengan DPR nanti bisa menyepakati biaya yang final haji dengan skenario penyelenggaraan terbaik.

Kemenag akan berdiskusi secara intensif agar rasionalisasi haji bisa terwujud. Tujuannya kenaikan biaya haji

seperti yang terjadi pada 2022 bisa diantisipasi lebih awal. "Poinnya adalah dalam satu bulan ke depan kita berharap situasi semakin baik. Konsep berhaji itu adalah *istitha'ah* atau seseorang yang memiliki bekal secara finansial," tandas Hilman.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah menerangkan bahwa kenaikan biaya haji yang ditanggung jamaah haji reguler sudah memenuhi nilai keadilan. "Apa yang disampaikan Kementerian Agama sangat masuk akal. Sudah mempertimbangkan risiko," ujar Fadlul.

Dia mengungkapkan, hampir setiap tahun biaya haji yang dibutuhkan naik akibat inflasi dan kurs. Dia mencontohkan, pada 2010 biaya haji yang dibutuhkan totalnya Rp34,5 juta dengan Rp30 juta dibebankan pada setiap jamaah (Bipih) dan Rp4,45 juta diambil dari nilai manfaat. "Jadi, nilai manfaatnya hanya 13%, sementara Bipih-nya 87%," jelas Fadlul.

Pada 2022 ada kenaikan biaya layanan haji (*masyair*) signifikan yang tergolong tidak normal. "Total biaya haji dari Rp70 jutaan jadi Rp90 jutaan. Karena tahun lalu kenaikan

biaya tidak dibebankan ke jamaah, jadi penggunaan nilai manfaatnya yang naik dua kali lipat dari kondisi normal, ini masalahnya," lanjut Fadlul.

Menurut Fadlul, jika pada 2023 biaya yang dibebankan ke jamaah tidak naik dan penggunaan nilai manfaat masih besar seperti pada 2022, maka hak nilai manfaat dari jamaah haji pada tahun-tahun mendatang akan tergerus. "Kalau penggunaan nilai manfaatnya terus besar seperti tahun lalu, jamaah haji yang berangkat tahun-tahun mendatang, nilai manfaatnya diambil sama yang jamaah yang sekarang, justru itu yang tidak adil," kata Fadlul.

Fadlul juga menjelaskan bahwa masih ada diskusi lanjutan bersama DPR terkait berapa persentase yang harus dibayar jamaah dan berapa yang harus dibebankan pada nilai manfaat.

"Bisa dinego, enggak ada masalah. Kalau penggunaan nilai manfaat lebih dari 30%, maka akan menggerus nilai manfaat dari jamaah haji yang akan berangkat tahun-tahun selanjutnya," tutup Fadlul.

abdulhakim